

## KAPAL PESIAR MS SEABOURN ENCORE KUNJUNGI SABANG

Penari menampilkan tarian Aceh, Ranup Lampung saat penyambutan kedatangan wisatawan kapal pesiar MS Seabourn Encore berbendera Bahamas di pelabuhan CT3 Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) provinsi Aceh, Senin (19/12). Kapal pesiar itu membawa 512 wisatawan dan 440 kru yang berada di Sabang selama delapan jam guna mengunjungi sejumlah objek wisata di pulau tersebut sebelum melanjutkan perjalanan menuju Phuket, Thailand.



FOTO: ANTARA

## APBN 2023 Fokus Tingkatkan Produktivitas Nasional dan Jaga Keberlanjutan Keuangan Negara

Total belanja negara yang disepakati dalam APBN mencapai Rp3.061,2 triliun, terdiri atas Rp2.246,5 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp814,7 triliun untuk tranfer ke daerah. Ketika transfer ke daerah sudah diserahkan kepada provinsi dan kabupaten/kota, harapannya percepatan dari eksekusi anggaran juga bisa dilakukan mulai di awal tahun.

JAKARTA (IM) - APBN 2023 diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat.

Pada 1 Desember 2022, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023 di Istana Negara kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. "Kita mempercepat penyerahan DIPA supaya bisa

segera dapat dieksekusi dan waktu pelaksanaan menjadi semakin panjang dalam tahun bersangkutan. Target kita yang pertama mendorong bagaimana setiap K/L dapat segera mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan di dalam DIPA masing-masing," kata Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya, dikutip dari laman Kemenkeu, Senin (19/12).

Target kedua, lanjut Made, untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan pada 2023 oleh tiap satuan kerja yang ada di K/L.

Total belanja negara yang disepakati dalam APBN mencapai Rp3.061,2 triliun, terdiri atas Rp2.246,5 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp814,7 triliun untuk tranfer ke daerah. Ketika transfer ke daerah sudah diserahkan kepada provinsi dan kabupaten/kota, harapannya percepatan dari eksekusi anggaran juga bisa dilakukan mulai di awal tahun.

"Yang kita harapkan sebenarnya ketika DIPA sudah diserahkan lebih awal, ya ayo segera, sehingga manfaat dari belanja APBN itu semakin cepat juga dirasakan oleh masyarakat," ungkap Made.

Selain itu, Made menuturkan bahwa Kementerian Keuangan juga terus mendorong pemerataan penyerapan. Ditjen Perbendaharaan yang ada di daerah sangat aktif memberikan pendampingan kepada setiap satuan kerja yang ada di wilayahnya ketika mereka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sehingga di dalam pencairan anggarannya tidak terjadi kendala.

"Di sisi lain, pemerintah juga mendorong bagaimana proses pengadaan barang dan jasa sedapat mungkin dilakukan melalui e-katalog. Proses transaksinya langsung bisa dilakukan, jadi tidak ada lagi

proses tender yang butuh sampai 3 bulan atau mungkin terjadi gagal lelang," ujar Made.

Made juga menekankan, APBN 2023 bernuansa optimis dan waspada. Optimis lantaran berbagai indikator menunjukkan bahwa geliat ekonomi Indonesia dibandingkan negara-negara lain masih berada di arah yang positif. Waspada karena pemerintah terus memitigasi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan.

"Jadi, mudah-mudahan ekonomi tetap tumbuh positif," ujarnya. ● hen

## BP Tapera Sebut Perumahan Subsidi Masih Menjanjikan di 2023

JAKARTA (IM) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebutkan, industri perumahan subsidi masih menjanjikan bagi pelaku usaha sektor properti pada tahun 2023.

"Kami optimis, industri perumahan, khususnya perumahan subsidi masih menjanjikan di tahun mendatang," ujar Komisiner BP Tapera Adi Setianto dalam acara "Economic Outlook dan Prospek Sektor Perumahan Tahun 2023" yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (19/12).

Dilansir dari Antara, Adi Setianto menyatakan, kreativitas skema pembiayaan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta dukungan para pemangku kepentingan dari ekosistem perumahan diyakini akan mampu mewujudkannya.

Disebutkan, pada 2023, FLPP ditargetkan akan disalurkan untuk sebanyak 220.000 unit rumah senilai Rp25,18 triliun. Sedangkan untuk pembiayaan Tapera sebanyak 10.000 unit senilai Rp1,05 triliun.

Tercatat, realisasi penyaluran dana FLPP tahun ini per 14 Desember 2022 sebesar 216.029 unit senilai Rp24,03 triliun, sehingga penyaluran dana FLPP dari tahun 2010-2022 sebesar 1.159.608 unit senilai Rp99,21 triliun.

Ia menyampaikan, terdapat beberapa indikasi positif yang bisa memacu semangat untuk terus mendorong industri perumahan 2023 antara lain pertama dari 24 negara di dunia yang telah mengeluarkan data PDB kuartal tiga tahun 2022, terdapat 15 negara (62,5 persen) mengalami perlambatan ekonomi, 2 dua negara (8,3 persen) stagnan dan hanya 7 negara (29,2 persen) yang mengalami pertumbuhan ekonomi termasuk Indonesia.

Kedua, lanjutnya, kenaikan tingkat suku bunga di RI relatif moderat sebesar 175 bps (basis poin), menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang dipadukan dengan kebijakan fiskal yang terukur efektif untuk meredam peningkatan inflasi lebih lanjut. Data BPS juga menunjukkan

bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2022 mencapai 5,72 persen secara tahunan dan tumbuh 1,81 persen secara kuartalan.

"Ekonomi Indonesia relatif kuat dalam menahan tekanan inflasi mengingat secara fundamental Indonesia mengalami surplus perdagangan 30 bulan berturut-turut karena berkah komoditas yang diikuti dengan kombinasi bauran kebijakan moneter sehingga penyesuaian tingkat bunga tidak agresif dibandingkan dengan negara-negara lain," kata Adi Setianto.

Ia berpendapat, berbagai bauran kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah mulai dari peningkatan Giro Wajib Minimum (GWM), peningkatan tingkat bunga terukur, serta kebijakan pendukung lainnya dinilai cukup efektif menjaga tingkat inflasi pada tingkat yang akseptabel. Dengan demikian, IMF dalam rilis terakhir memperkirakan Indonesia tumbuh 5,3 persen tahun ini dan 5 persen pada 2023. ● hen

## Lab Holding Perkebunan Naik 66,4 Persen

JAKARTA (IM) - Holding Perkebunan Nusantara mencatatkan kinerja positif. Hal itu tidak lepas dari komando Menteri BUMN Erick Thohir yang terus melakukan transformasi menyeluruh di tubuh PTPN Group. Salah satu upaya yang dilakukan sejak tiga tahun terakhir, adalah merestrukturisasi organisasi dan terus memperkuat integrasi di antara anak-anak perusahaan.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan transformasi dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan kinerja dan efektivitas perusahaan.

"Setidaknya, kami telah menerapkan lima strategi akselerasi kinerja perusahaan dengan nilai-nilai AKHLAK sebagai core value BUMN," ujarnya dalam keterangan tertulis, kemarin.

Adapun kelima strategi tersebut yaitu optimalisasi portofolio dan *operational excellences, commercial excellences* dan ekspansi hilir, optimalisasi aset dan kemitraan strategis, pengembangan kapabilitas dan budaya, serta meningkatkan sistem dan teknologi.

Upaya manajemen dan semangat insan PTPN Group dalam menerapkan perubahan tersebut telah membuahkan hasil yang membanggakan, terbukti dari capaian kinerja PTPN Group yang terus meningkat.

"Sampai dengan Oktober 2022, tercatat laba bersih kita sebesar Rp5,06 triliun, naik 66,4% dan EBITDA Rp12,29 triliun atau naik 17,46% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya," kata Abdul Ghani.

Ia menegaskan, capaian

positif itu tak lepas dari berbagai inovasi yang telah dilakukan. Terhadap inovasi bisnis perusahaan, holding di klaster perkebunan dan kehutanan telah melakukan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) berbasis limbah perkebunan, pembangkit listrik tenaga biogas, tenaga surya, dan tenaga air, serta pengembangan bahan bakar nabati (biofuel) dan biofuel yang ramah lingkungan.

Dalam inovasi investasi, PTPN Group juga telah membangun kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei, kawasan industri terpadu Batang, dan kawasan agro wisata. Sementara itu, inovasi di bidang teknologi informasi, telah diterapkan melalui agro human information system dan digital farming berbasis *mobile application*, sensor pabrik berbasis *internet of things* dan SCADA, serta sistem informasi geografis.

"Atas pencapaian tersebut, PTPN Group memperoleh skor IT maturity level 3.68 (Terkelola)," paparnya.

PTPN Group juga sudah bertransformasi dalam budaya serta sumber daya manusia. Di antaranya melalui pembangunan PT LPP Agro Nusantara sebagai corporate university PTPN Group, integrasi talent management system nusantara, menghidupkan kembali budaya *planters, human capital digitalize, culture and change management*, dan remunerasi berbasis kinerja.

"PTPN Group terus berkomitmen untuk mengembangkan dan melestarikan sumber daya alam serta sumber daya manusia. Karena keberhasilan program transformasi akan membawa PTPN Group menjadi kebanggaan baru Indonesia," kata Abdul Ghani. ● pan



FOTO: ANTARA

## KETERSEDIAAN PUPUK NASIONAL

Pekerja mengangkut karung pupuk urea di gudang lini 3 Jatibarang pupuk Kujang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (19/12). Kementerian Pertanian menyatakan total alokasi pupuk subsidi tahun 2023 sebanyak 9 juta ton yang terdiri dari 5,5 juta ton urea dan 3,2 juta ton NPK dan 221 ribu ton NPK formula khusus.

**BPR SUPRA**

**PULAUINTAN**  
General Contractor

**PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA**  
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

## IPO, Sunindo Pratama Bidik Rp180 Miliar

JAKARTA (IM) - PT Sunindo Pratama Tbk siap melakukan penawaran umum perdana saham atau *initial public offering* (IPO). Sunindo Pratama berencana melepas sebanyak 600 juta saham atau 24,00% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Mengutip prospektus perseroan, Senin (19/12), perseroan menawarkan harga Rp280 hingga Rp300 per saham. Dengan demikian, dana segar yang akan diperoleh perseroan berkisar Rp168 miliar hingga Rp180 miliar.

Calon emiten energi ini akan menggunakan 40,14% atau sekitar Rp70,65 miliar dana hasil IPO untuk pembelian sekitar 39,96% saham PT Rainbow Tubulars Manufacture (PT RTM), anak perusahaan perseroan dengan kepemilikan 60,00% saham oleh perseroan.

Tujuan dari pembelian saham tersebut untuk memperkuat posisi perseroan di industri OCTG tubing di Indonesia, meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik yang meningkat maupun pasar ekspor ke depannya, serta menjamin rantai pasokan OCTG tubing ke perseroan.

Kemudian, sebesar 42,61% atau Rp75 miliar akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha PT RTM kepada supplier dan modal kerja PT RTM. Secara rinci, sekitar

Rp50 miliar akan digunakan oleh PT RTM untuk pelunasan sebagian utang usaha kepada pemasok, dan sekitar Rp25 miliar akan digunakan oleh PT RTM untuk modal kerja, untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung, serta untuk membiayai kegiatan operasional.

Sementara, sisanya sekitar Rp30,35 miliar akan digunakan untuk modal kerja perseroan, termasuk untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung, serta untuk membiayai kegiatan operasional perseroan.

"Penggunaan dana untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung, serta untuk membiayai kegiatan operasional perseroan dimaksud merupakan beban operasional atau *operational expenditure* (OPEX)," demikian tertulis dalam prospektus.

Sunindo Pratama dijadwalkan melantai di bursa pada 9 Januari 2023 dengan kode SUNI. Sementara itu, perseroan memulai periode penawaran awalnya pada 19 Desember hingga 23 Desember 2022.

Tanggal efektif diperkirakan akan didapat pada 29 Desember 2022. Kemudian, masa penawaran umum akan digelar pada 2 Januari hingga 5 Januari 2023. Lalu, tanggal penjabatan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 5 dan 6 Januari 2023. ● dot

## Sumbang Devisa USD7 Miliar, Industri Pengolahan Karet Pacu Diversifikasi Produk

JAKARTA (IM) - Kementerian Perindustrian (Kemperin) terus mendorong pengembangan industri pengolahan karet nasional yang berdaya saing global, paparnya.

Kemperin telah mendorong peningkatan pemanfaatan karet alam melalui aspal karet. Hal ini perlu juga didorong untuk pengembangan produk turunan karet lainnya, seperti bantalan jembatan, *seismic bearing, rubber dam, belt conveyor, dock fender* dan lain-lain.

"Untuk implementasi hal ini, pemerintah telah membuat program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Melalui Program P3DN ini diharapkan pengadaaan proyek yang didanai oleh APBN dan APBD serta pengadaan oleh sektor BUMN dapat menyerap produk industri dalam negeri yang sudah ber-TKDN," imbuhnya.

Di samping itu, upaya lain yang bisa dilakukan adalah melalui optimalisasi penggunaan karet dalam negeri melalui *Demand Promotion Scheme* (DPS). Kebijakan ini bertujuan meningkatkan penyerapan karet alam di dalam negeri sekaligus menekan impor barang jadi karet.

"Implementasi dari DPS ini, sejak 2016 pemerintah telah mengembangkan aspal karet untuk infrastruktur jalan nasional dan jalan daerah di daerah produsen karet, namun sampai saat ini implementasi aspal karet masih jauh dari yang diharapkan sehingga dampaknya tidak terlalu besar untuk peningkatan penyerapan karet alam secara nasional," ungkap Putu.

Bahkan, pemerintah juga berupaya untuk mendorong harga karet di dalam negeri. Langkahnya antara lain melalui forum karet internasional, yang melibatkan tiga negara produsen utama karet alam, yaitu Indonesia, Thailand dan Malaysia yang tergabung dalam organisasi *International Tripartite Rubber Council* (ITRC). ● dro